

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk membantu peneliti dalam menentukan langkah-langkah sistematis dari teori dan analisis yang digunakan dalam penelitian. Peneliti mencoba memaparkan hasil penelitian terdahulu guna menjadikan bahan referensi dan perbandingan atas penelitian sebelumnya. Dan untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) dengan judul “Sosialisasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kelurahan Pucang Sawit”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan dari program Kampung KB merupakan inovasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tujuannya adalah meningkatkan kemampuan keluarga kecil sehingga mampu untuk lebih berdaya demi kesejahteraan keluarga. Pada penelitian tersebut menggunakan teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi adalah proses dari penyampaian pesan secara luas dari komunikator kepada komunikan yang memiliki sistem sosial yang jelas. Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti di Kampung KB. Selain persamaan penelitian ini juga punya perbedaan yaitu terkait dengan fokus penelitian, dimana fokus penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai

komunikasi pemberdayaan dari program Kampung KB yang ada di Kota Balikpapan.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Nurhafifah Zultha (2017) dengan judul “Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Penelitian yang dilakukan oleh Nurhafifah ini memiliki tujuan yaitu menganalisis program Kampung KB yang ada di Kelurahan Kota Karang Raya. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat mengetahui hambatan pelaksanaan program Kampung KB. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhafifah Zultha (2017) memakai metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu implementasi dari Kampung KB sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Hanya saja sumber daya yang ada belum sesuai dengan target yang diharapkan, terbatasnya anggaran dan kurang adanya partisipasi dari masyarakat menjadi faktor penghambat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai program Kampung KB dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan komunikasi pemberdayaan dari program Kampung KB yang ada di Kota Balikpapan.

Penelitian yang dilakukan oleh R. Priyo Radianto (2015) dengan judul Strategi Komunikasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi DIY dalam Menginformasikan Program Pembentukan

Kampung KB di Yogyakarta Tahun 2015". Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan deskripsi strategi komunikasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi DIY dalam menginformasikan Program Kampung KB di Yogyakarta dan mengetahui hambatan dalam menginformasikan Program Kampung KB dan strategi yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi DIY. Pada penelitian ini metode yang dipakai adalah deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara dan juga dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BKKBN Provinsi DIY melaksanakan kegiatan menyampaikan pesan dengan tujuan untuk menekan laju dari pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah akseptor KB. Hasil penyampaian pesan melalui strategi komunikasi dilakukan dengan baik dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pada saat pelaksanaan strategi komunikasi ditemui kendala di lapangan berupa media yang dipakai untuk sosialisasi masih terbatas. Hal ini mempunyai dampak pada masyarakat yang masih banyak tidak mengetahui program dari BKKBN Provinsi DIY ini. Penelitian ini memiliki persamaan penelitian yaitu meneliti tentang Kampung KB. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk perbedaannya adalah di penelitian pada penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai komunikasi pemberdayaan dari program Kampung KB yang ada di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu

2.2 Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Komunikasi Pemberdayaan

Menurut Suharto (2014: 58), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- 1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan;
- 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2014: 58).

Pendapat lain dikemukakan oleh Ife (1995) yang dikutip oleh Suharto (2014: 59) yang menyatakan bahwa pemberdayaan terdapat dua kunci yang penting yaitu adanya kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan maksudnya tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan politik saja akan tetapi juga terkait dengan kesempatan dalam menentukan keputusan terkait dengan tempat tinggal, pekerjaan; aktivitas ekonomi sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang produktif dan menghasilkan(Suharto, 2014: 59).

Pengertian tentang pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan keinginan baik sebagai individu, kelompok atau masyarakat. Pemberdayaan juga

ditujukan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk dapat mengakses sumber daya yang ada dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya dan kegiatan sosialnya (Theresia, dkk, 2015: 115).

Zimmerman, 1996 yang dikutip oleh Gitosaputro (2015: 28) menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membantu masyarakat dapat melakukan pengembangan dirinya. Hal ini bertujuan agar dapat mengatasi masalah yang ada dan mengambil keputusan yang baik. Proses pemberdayaan dilakukan dengan adanya pemberian wewenang, akses yang baik terhadap sumber daya dan lingkungan yang mendukung.

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut UNICEF (1997) memiliki pendekatan dimana pemberdayaan yang bertumpu pada risiko keluarga, kebutuhan dan hak-haknya dalam rangka menentukan prioritas dan strategi pembangunan (Gitosaputro, 2015: 27). Fokus pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada keluarga berisikan:

- 1) membangun kapasitas internal keluarga (pengetahuan, keterampilan, sikap dan sebagainya);
- 2) mengubah kepercayaan dan perilaku yang menghambat kemajuan (perkawinan usia dini, kriminalitas);
- 3) memperkuat nilai tradisional yang kondusif untuk pembangunan (gotong royong, rasa hormat) dan penyaringan nilai-nilai baru (Gitosaputro, 2015: 28).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses dari serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk berdayanya masyarakat di tingkat ekonomi lemah, yang mengalami kemiskinan.

Pemberdayaan yang baik, hendaknya mempunyai tujuan pemberdayaan sesuai dengan kondisi masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan, diantaranya:

1) Perbaikan kelembagaan

Diharapkan dengan adanya pemberdayaan lembaga dapat menjalin kemitraan dan dapat berkembang.

2) Perbaikan usaha

Hal ini dilakukan dengan peningkatan melalui sektor pendidikan, akses, kegiatan dan kelembagaan

3) Perbaikan pendapatan

Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan untuk produktif dan mendapatkan keuntungan yang meningkat bagi keluarga dan masyarakat

4) Perbaikan lingkungan

Pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sarana prasarana di lingkungan sekitar

5) Perbaikan kehidupan

Pendapatan dan lingkungan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dan masyarakat

6) Perbaikan masyarakat

Tingkat kualitas hidup yang baik dengan dukungan sarana prasarana lingkungan yang baik maka diharapkan terwujud kehidupan di dalam masyarakat yang baik (Theresia, dkk, 2015: 153-154).

Pemberdayaan masyarakat selama ini fokus pada peningkatan ekonomi saja untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan yang produktif dengan tujuan agar masyarakat dapat meningkatkan *skill* nya dan mampu untuk berkembang dengan tujuan meningkatkan pendapatan usahanya.

Pengembangan kegiatan produktif tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan kapasitas usaha. Pengembangan kapasitas usaha menjadi hal yang penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan jika tidak memiliki tujuan maka kegiatan yang dilakukan tidak banyak diikuti oleh masyarakat. Pengembangan kapasitas usaha dapat mencakup:

- 1) Pemilihan komoditas dan jenis usaha;
- 2) Studi kelayakan dan perencanaan bisnis;
- 3) Pembentukan badan usaha;
- 4) Pengelolaan SDM;
- 5) Manajemen produksi dan operasi;
- 6) Pengembangan jejaring dan kemitraan;
- 7) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung (Theresia, dkk, 2015: 156).

Pemberdayaan ekonomi merupakan langkah yang dilakukan untuk penguatan ekonomi dan mempunyai daya saing. Hanya saja terdapat kendala dalam pengembangannya yaitu adanya kendala structural sehingga perlu adanya perubahan struktural yang ada (Hutomo, 2000: 6). Menurut Ginandjar

Kartasasmita (1996) yang dikutip oleh Hutomo (2000: 6), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan dari segi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Penguatan yang dimaksud dapat berupa penguatan dari sisi produksi, pemasaran, masyarakat, keterampilan dan juga dari sisi regulasi.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan bagi masyarakat, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas saja. Pemberdayaan dilakukan juga tidak hanya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan usaha dan bantuan modal. Pemberdayaan lebih kepada memberikan jaminan adanya kerjasama dan jalinan kemitraan bagi masyarakat yang membutuhkan dan yang mempunyai kesempatan untuk berkembang.

Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:

- a) Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);
- b) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat;
- c) Pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- d) Penguatan industri kecil;
- e) Mendorong munculnya wirausaha baru; dan
- f) Pemerataan spasial (Hutomo, 2000: 7)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat mencakup:

- 1) Peningkatan akses bantuan modal usaha;
- 2) Peningkatan akses pengembangan SDM; dan
- 3) Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang
- 4) mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal

(Hutomo, 2000: 8)

Komunikasi dalam pemberdayaan menurut Indardi (2016: 116) merupakan bahasan dalam bidang komunikasi yang memfokuskan pada keterlibatan masyarakat. Komunikasi pemberdayaan adalah:

Proses-proses komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada proses yang bersifat transaksional dan interaktif dari pada linear. Dalam pemberdayaan masyarakat, berbagai kegiatan/ proyek pembangunan lebih menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki berbagai sisi kemanusiaannya, baik berupa keinginan, cita-cita, daya, nilai-nilai, budaya dan peradaban, dan sebagainya (Indardi, 2016: 116)

Lebih lanjut Indardi menyatakan bahwa komunikasi pemberdayaan merupakan penyampaian pesan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Komunikasi ini mempunyai fokus pada penyampaian komunikasi, konteks komunikasi, penggunaan media dalam komunikasi (Indardi, 2016: 109).

Komunikasi pemberdayaan masyarakat adalah:

“Proses komunikasi yang bertujuan menumbuhkan motivasi dan memberikan kesempatan pada masyarakat dengan jalan membuka saluran-saluran komunikasi sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan dan peningkatan kemampuan yang mereka miliki sekaligus menempatkan mereka sebagai stakeholder aktif. Dalam proses komunikasi tersebut dilakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar proses dan tujuan komunikasi yang direncanakan dapat tercapai” (Muhammad, 2004: 22)

Pendapat yang ada tersebut mengarah pada pesan komunikasi yang relevan dengan penerima pesan dan disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat.

Komunikasi juga harus disesuaikan dengan konteks dari pemberdayaan yang dilakukan. Media komunikasi yang tepat akan berpengaruh pada sampai tidaknya pesan pemberdayaan. Dalam komunikasi pemberdayaan merupakan kajian di bidang komunikasi yang menekankan pentingnya adanya partisipasi.

Murphy (2014) yang dikutip oleh Indardi (2016: 109) menyatakan bahwa peran komunikasi menjadi penting karena informasi yang tidak sesuai akan berdampak pada masyarakat yang tidak mempunyai keinginan untuk berpartisipasi. Dalam pelaksanaan komunikasi, tentu saja tidak selalu lancar ada hambatan yang terjadi sehingga kemungkinan akan ada salah paham.

Pada komunikasi pemberdayaan penting bagi masyarakat selaku penerima pesan pemberdayaan untuk tidak menganggap komunikator sebagai orang lain, tetapi harus dianggap sebagai bagian dari masyarakat sendiri. Hal ini akan berdampak pada pesan yang mudah diterima dan tepat sasaran dan pesan dapat diterima dengan baik.

Berlo menyatakan upaya yang dapat diberikan kepada masyarakat penerima pemberdayaan sehingga dapat mengakses fasilitas yang ada adalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mendukung seperti komunikatornya, pesan yang disampaikan, media, masyarakat yang menerima program pemberdayaan dan bagaimana umpan balik dari masyarakat kepada komunikator.

Menurut Joseph R. Dominick:

a) Komunikator

Komunikator merupakan fasilitator yang menyampaikan pesan berdasarkan tugas wewenangnya. Dilihat dari status dan lembaga tempatnya bekerja komunikator dapat dibedakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS); penyuluh/fasilitator swasta/LSM; dan penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela.

b) Pesan

Pesan adalah informasi yang diberikan kepada masyarakat penerima pemberdayaan.

c) Saluran

Saluran merupakan media yang digunakan dalam proses memberikan daya kepada masyarakat penerima program pemberdayaan.

d) Proses membuka kode

Proses ini merupakan proses menerjemahkan pesan yang ada dari simbol atau lambang seperti bahasa non verbal sehingga dapat dimaknai dan dipahami yang berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik.

e) Komunikan

Komunikan dalam hal ini adalah masyarakat selaku penerima pemberdayaan masyarakat yang memiliki karakteristik diantaranya adalah

1) memiliki karakteristik pribadi yang meliputi jenis kelamin umur dan juga suku/agama; 2) karakteristik dapat juga dilihat dari segi sosial ekonomi yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pendapatan dan keterlibatan dalam kelompok;

3) perilaku keinovatifan dari masyarakat seperti apakah sebagai perintis, pelopor, kategori lambat dan golongan yang tidak menerima perubahan;

4) moral dari ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat

f) *Feedback*

Feedback merupakan adanya respon dari masyarakat selaku penerima program pemberdayaan.

Program pemberdayaan masyarakat diyakini merupakan program yang dapat untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat. Aspek yang memberikan pengaruh pada keberhasilan tersebut diantaranya adalah proses komunikasi yang dilakukan. Proses komunikasi adalah aspek penting, yang membedakannya dari strategi/ pendekatan pembangunan yang lainnya (Indardi, 2016: 106).

Kajian tentang komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan kajian komunikasi yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat. Hal ini berdampak pada proses penyampaian pesan dalam program pemberdayaan masyarakat menekankan pada pentingnya saling memberi dan menerima dan interaksi dari masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini menempatkan masyarakat sebagai subjek penerima program pemberdayaan yang memiliki keinginan untuk berubah pada hal yang positif (Indardi, 2016: 106).

2.3. Tahapan dalam Komunikasi Pemberdayaan

Komunikasi pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu:

- 1) Tahap persiapan yang dilakukan dengan menyiapkan petugas dan menyiapkan wilayah sebagai sasaran pemberdayaannya.
 - 2) Tahapan pengkajian (*assessment*) yang dilakukan dengan identifikasi permasalahan dari permasalahan yang disampaikan masyarakat kepada petugas
 - 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan dimana pada tahapan ini petugas secara partisipatif melibatkan warga untuk ikut serta memikirkan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan membuat beberapa program alternatif.
 - 4) Tahap selanjutnya dilakukan dengan petugas yang mempunyai tugas sebagai agen perubahan membantu kelompok untuk menentukan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
 - 5) Tahap pelaksanaan program atau kegiatan merupakan tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sehingga dibutuhkan peran masyarakat
 - 6) Tahap evaluasi merupakan proses pengawasan dari warga dan petugas
 - 7) Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal antara petugas dengan masyarakat pada saat program pemberdayaan telah berakhir.
- (Suharto, 2005: 22-23).

Pelaksanaan proses dan tujuan pemberdayaan dilakukan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang meliputi 5P yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemukiman

Pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan potensi masyarakat sehingga dapat berkembang dengan baik di lingkungan pemukimannya

2) Penguatan

Pemberdayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dari masyarakat atas permasalahan yang dihadapi dan dapat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat secara mandiri

3) Perlindungan

Pemberdayaan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama kelompok lemah

4) Penyokongan

Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat sehingga dapat menjalankan peran, kegiatannya di masyarakat

5) Pemeliharaan

Pemberdayaan diharapkan mampu untuk menciptakan kondisi yang seimbang di masyarakat. Hal ini akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat yaitu masyarakat memiliki kesempatan untuk dapat berkembang dan mengembangkan usaha (Suharto, 2005: 66).

2.4 Teori Difusi Inovasi

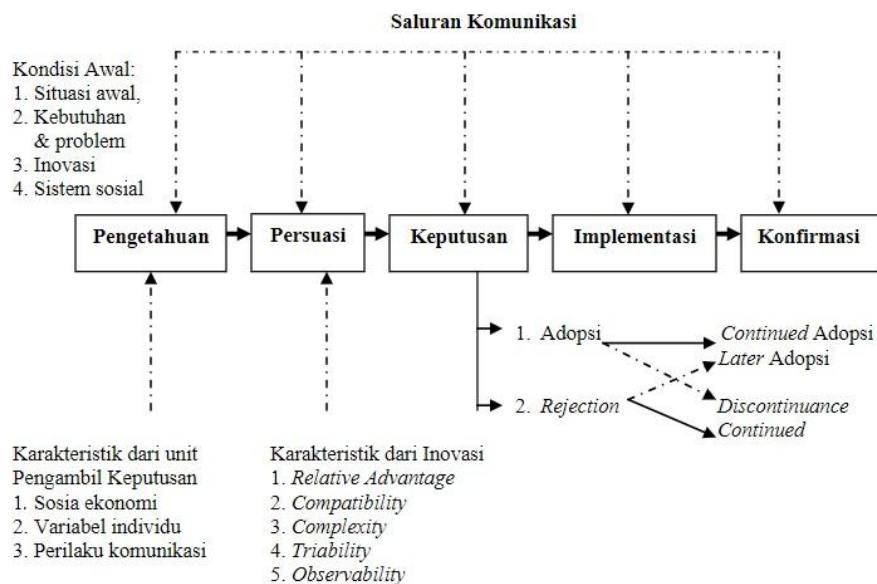
Difusi Inovasi terdiri dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. Rogers (1983) mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system). Disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan

fungsi sistem sosial. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap/dirasa baru terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut. Dari kedua padanan kata di atas, maka difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.

Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi (ilmu pengetahuan, teknologi, bidang pengembangan masyarakat) oleh anggota system sosial tertentu. Sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi sampai kepada masyarakat.

Rogers (1983) menjelaskan dalam penerimaan suatu inovasi, biasanya seseorang melalui beberapa tahapan yang disebut Proses Putusan Inovasi. Proses putusan inovasi merupakan proses mental yang mana seseorang atau lembaga melewati dari pengetahuan awal tentang suatu inovasi sampai membentuk sebuah sikap terhadap inovasi tersebut, membuat keputusan apakah menerima atau menolak inovasi tersebut, mengimplementasikan gagasan baru tersebut, dan mengkonfirmasi keputusan ini Rogers (1983) mengatakan bahwa faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya suatu inovasi diadopsi atau

ditolak tergantung pada para anggota suatu sistem sosial menghayati lima karakteristik inovasi yang meliputi: relative advantage(keuntungan relatif), compatibility (keserasian),complexity (kerumitan), triability (kemungkinan dicoba), dan observability (kemungkinan diamati) hal ini sangat menentukan tingkat suatu adopsi daripada faktor lain seperti jenis keputusan, salurankomunikasi, sistem sosial dan usaha yang intensif dari agen perubahan. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori diffusion of innovation,hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.4. Teori Difusi Inovasi (*Theory diffusion of innovation*) Rogers (1983)

2.5. Kerangka Pikir

Teori difusi inovasi Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.

Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.” Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat beberapa elemen pokok, yaitu: 1. Inovasi Inovasi, gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya.

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Talang Jawa dikarenakan program Kampung Keluarga Berencana di wilayah ini sudah terbentuk sampai dengan tahun 2021. Pada penelitian ini penulis menentukan Kelurahan Talang Jawa sebagai objek penelitian. Pemilihan Kampung KB tersebut sebagai objek penelitian dikarenakan KB Talang Jawa ditetapkan menjadi Kampung KB Percontohan sehingga menjadi contoh bagi kampung KB di wilayah lain. Kampung KB Talang Jawa pada awalnya terbentuk dikarenakan masuk dalam kategori wilayah yang kumuh, padat penduduk, minim peserta KB namun saat ini wilayah tersebut sudah mengalami peningkatan dalam hal kesejahteraan masyarakat dan peserta KB meningkat. Oleh karena itu perlu untuk diketahui bagaimana komunikasi pemberdayaan yang ada di ketiga Kampung KB tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik tercapai tujuan yang ditetapkan.

Program Kampung KB ini menarik untuk diteliti karena memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat seperti menumbuhkan peluang usaha baru

seperti , kuliner, tanaman dapur. Hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat penerima program Kampung KB di Kelurahan Talang Jawa dapat diketahui bahwa dengan adanya program Kampung KB masyarakat mengalami peningkatan pendapatan. Usaha kuliner yang dijalankan mendapatkan bantuan modal dan bimbingan terkait dengan produksi dan pemasaran. Salah satu pelaku usaha yang penulis wawancarai mengembangkan produksi usaha kuliner seperti kue dan lauk tabur sejak tahun 2015 telah mengalami peningkatan produksi dan berdampak pada peningkatan pendapatan yang diperolehnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komunikasi Pemberdayaan Pada Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat –OKU

